

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Laporan tahunan menyajikan informasi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder sedangkan laporan keuangan merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi keuangan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan selama periode tertentu untuk membantu pengambilan keputusan. Menurut Wardani & Santi (2018), *stakeholder* memiliki kepentingan berbeda dalam perusahaan, seperti pemberi modal berkepentingan pada tingkat pengembalian yang maksimal, manajemen berkepentingan atas insentif yang diperoleh, pemerintah berkepentingan atas penghasilan kena pajak yang dipungut, serikat/komunitas masyarakat berkepentingan atas hak-hak yang didapat mereka telah terpenuhi, masyarakat berkepentingan atas tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Salah satu elemen laporan keuangan yang berhubungan dengan stakeholder adalah laporan laba/rugi. Laporan laba/rugi mencerminkan capaian kinerja manajemen dan kinerja perusahaan selama periode tertentu yang dapat membantu keputusan para stakeholder, khususnya para pemberi modal berupa pemegang saham dan kreditur, melalui informasi laba. Maka dari itu, kualitas laba juga harus diperhitungkan agar berguna untuk pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan merupakan tanggungjawab seorang manajer perusahaan. Apabila tujuan perusahaan dapat tercapai, yakni laba yang diperoleh, maka manajemen berhak menerima insentif berupa bonus berbasis laba yang dihasilkan sehingga

dapat memotivasi manajemen untuk menonjolkan prestasi kinerjanya melalui penyimpangan praktik oportunistik seperti manajemen laba.

Manajemen laba adalah adanya campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (Rahdal, Zulbahridar, and Yasni, 2017). Praktik manajemen laba tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum namun menurut Hsieh et al. (2018) menyatakan secara umum, manajemen laba diyakini memiliki efek negatif pada kualitas laba dan mengurangi kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Fatmawati (2016) praktik manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengurangi kepercayaan angka laba laporan keuangan. Motivasi untuk mencapai target laba perusahaan membuat manajer perusahaan mengabaikan praktik bisnis yang baik yaitu harus transparan dan jujur. Sebagai pihak internal perusahaan, manajer berhak mengatur informasi laba perusahaan sehingga dapat memungkinkan untuk bertindak oportunistik dengan melakukan manajemen laba demi mendapat reward yang tinggi. Sementara itu, manajer yang berorientasi panjang akan kurang termotivasi untuk memaksimalkan kompensasi mereka jika melibatkan manajemen laba, karena pengukuran kinerja mereka berdasarkan non finansial, seperti kepuasan pelanggan (Widuri & Sutanto, 2019).

Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba, diantaranya Abbadi et al. (2016), Abedalqader, et al. (2016), Alzoubi (2016a), Alzoubi (2016b), Alzoubi (2016c), Bassiouny et al. (2016), Gras-Gil et al. (2016), Hsieh et al. (2018), Li et al. (2016), Kordestani

and Mohammadi (2016), Lazzem and Jilani (2017), Mongrut and Winkelried (2018), Nia et al. (2017), Rahman et al. (2018), Yasser and Soliman (2018), Zgarni et al. (2016).

Peneliti dari Indonesia antara lain Abduh and Rusliati (2018), Agustia and Suryani (2018), Agustina, Sulia, and Rice (2018), Aorora (2018), Asward and Lina (2015), Basyirun (2018), Brigita & Adiwibowo (2017), Chairunesia, Sutra, & Wahyudi (2018), Deviyanti and Sudana (2018), Dimara & Hadiprajitno (2017), Faranita & Darsono (2017), Fatmawati (2016), Haryanto and Lina (2017), Indracahya & Faisol (2017), Kamil and Ariyani (2017), Kamil *et al.* (2017), Lestari & Murtanto (2017), Lufita and Suryani (2018), Marsha and Ghozali (2017), Mujtahidin and Herawaty (2016), Narolita and Krisnadewi (2016), Nasution, Nazar, and Aminah (2018), Pasilongi, Nazar and Aminah (2018), Prakoso and Purwanto (2017), Pratama et al. (2016), Purbandari & Immanuela (2018), Purnama (2017), Putra et al. (2018), Rahdal et al. (2017), Rahmando (2016), Rice (2016), Richard and Ekadjaja (2018), Roskha et al. (2017), Sembiring & Nahumury (2018), Sihombing and Laksito (2017), Tala & Karamoy (2017), Umami (2018), Wardani & Isbela (2017), Widuri & Sutanto (2019), Widyaningrum et al. (2018), Widyasari, Harindahyani, and Rudiawarni (2017), Windra et al. (2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajer melakukan manajemen laba antara lain profitabilitas, *leverage*, *free cash flow*, *Corporate Social Responsibility*, umur perusahaan, adopsi IFRS, ukuran perusahaan, kualitas audit, audit internal, *corporate governance*, struktur kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan terkonsentrasi,

komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, persaingan pasar produk, strategi bisnis, *internal governance*, kualitas *top management team*.

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen laba adalah profitabilitas. Tujuan utama perusahaan adalah mensejahterakan pemegang saham melalui profitabilitas yang dihasilkan. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Laba yang dihasilkan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham dimana return yang akan diperoleh dari investasi tercermin melalui laba sehingga manajemen selaku agen dapat melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan terlihat baik dihadapan pemegang saham (Widyaningrum et al., 2018).

Penelitian yang mendukung profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba adalah Gras-Gil, Manzano and Fernández (2016), Tala & Karamoy (2017), Mujtahidin & Herawaty (2016), Windra et al. (2018), Purnama (2017), Kamil *et al.* (2017), Haryanto and Lina (2017), Pasilongi, Nazar and Aminah (2018). Dengan variabel dependen yang sama namun cara pengukuran menggunakan Conditional Revenue dari Stubben (2010), penelitian dari Indracahya & Faisol (2017) dan (Asward & Lina, 2015) mendukung profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba dan bernilai positif, yang berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka manajemen laba yang dilakukan oleh manajer juga akan meningkat untuk menghindari kurangnya minat investor terhadap saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Alzoubi (2016b), Alzoubi (2016c), Abbadi, Hijazi, and Al-Rahahleh (2016), Richard & Ekadjaja (2018) menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen

laba. Namun beberapa hasil penelitian lain menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba seperti peneliti Widyaningrum et al. (2018), Agustia and Suryani (2018), Mujtahidin and Herawaty (2016), Wardani & Isbela (2017), Umami (2018), Rice (2016).

Seperti dalam persamaan akuntansi dasar dimana  $\text{aset} = \text{utang} + \text{ekuitas}$  menunjukkan aset perusahaan didanai dari penjualan saham di pasar modal dan kebijakan utang. Untuk mengukur sejauh mana utang membiayai aset perusahaan dapat menggunakan rasio *leverage*. Rasio *leverage* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban (Umami, 2018). Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya yang nantinya akan meningkatkan keuntungan pemegang saham (Agustia and Suryani 2018). Proporsi *leverage* harus diperhatikan oleh manajer karena utang dapat menimbulkan naik dan turunnya profitabilitas sehingga menyebabkan perilaku manajer berupa manajemen laba. Utang dapat menurunkan profitabilitas karena penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap (Agustina et al., 2018). Menurut Rahmendo (2016) *leverage* juga menunjukkan risiko yang dialami perusahaan, semakin besar rasio *leverage* yang dialami perusahaan maka semakin besar pula risiko adanya ketidakpastian menghasilkan laba di masa depan yang dihadapi perusahaan, dikarenakan proporsi utang lebih besar dari aset. Perusahaan akan terancam default atau likudasi jika tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya.

Penelitian yang mendukung bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan adalah Gras-Gil, Manzano and Fernández (2016), Abbadi, Hijazi,

and Al-Rahahleh (2016), Alzoubi (2016a), Alzoubi (2016b), Widyaningrum et al. (2018), Roskha et al. (2017), Agustia and Suryani (2018), Rahdal, Zulbahridar, and Yasni (2017), Rahmando (2016), Deviyanti and Sudana (2018), Pratama et al. (2016), Yasser and Soliman (2018), Bassiouny, Soliman, and Ragab (2016), Rice (2016), Wardani & Isbela (2017), Asward and Lina (2015), Indracahya & Faisol (2017), Rahman et al. (2018) dan Dimara & Hadiprajitno (2017), Lazzem and Jilani (2017), Widyasari, Harindahyani, and Rudiawarni (2017), dan Faranita & Darsono (2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Murtanto (2017), Nasution, Nazar, and Aminah (2018), Alzoubi (2016c), Mujtahidin and Herawaty (2016), Dimara & Hadiprajitno (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut Mujtahidin and Herawaty (2016) *leverage* tinggi disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan, penerapan strategi yang kurang tepat, lemahnya pengawasan sehingga manajer dapat melakukan manajemen laba.

Akan tetapi menurut Brigita & Adiwibowo (2017) tidak terdapat pengaruh signifikan antara *leverage* dengan manajemen laba, walaupun perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, namun masih dikategorikan aman karena perusahaan masih mampu membayar kewajibannya, sehingga manajer tidak perlu melakukan praktik manajemen laba. Sampel perusahaan manufaktur pada penelitian Purnama (2017) tidak bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan dalam pengaturan jumlah laba apabila terjadi perubahan tingkat utang. Menurut Kamil and Ariyani (2017) *leverage* merupakan perbandingan nilai utang terhadap aset yang cenderung

berhubungan dengan pihak eksternal, seperti *supplier*, bank, dan kreditur lainnya sehingga *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena manajer tidak melakukan manajemen laba untuk menarik minat investor. Haryanto and Lina (2017), Richard and Ekadjaja (2018), Purbandari & Immanuela (2018), Agustina, Sulia, and Rice (2018), Umami (2018) juga menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada praktik manajemen laba.

*Free cash flow* merupakan arus kas yang benar-benar akan dibayarkan kepada investor termasuk pemegang saham dan pemberi hutang setelah perusahaan melakukan kegiatan operasional. Menurut Rahdal et al. (2017) arus kas bebas digunakan untuk akuisisi dan pembelanjaan modal dengan orientasi pertumbuhan bisnis, pembayaran utang dan dividen. Menurut Widyaningrum, Amboningtyas, & Fathoni (2018) perusahaan yang memiliki kelebihan dalam free cash flow memperoleh keuntungan dari berbagai kesempatan sehingga dianggap memiliki kinerja yang lebih baik dibanding perusahaan dengan free cash flow rendah. Penelitian yang mendukung *free cash flow* memiliki pengaruh positif ialah Widyaningrum, Amboningtyas, & Fathoni (2018), Rahdal et al. (2017), Windra et al. (2018), Gras-Gil et al. (2016). Berlainan dengan hasil penelitian Basyirun (2018) bahwa *free cash flow* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba karena sebagian besar investor termasuk *transient investors* yang terfokus pada informasi perusahaan dalam pembagian dividend dan tidak hanya digunakan untuk menyiasati pasar.

Dahulu, perusahaan cenderung melakukan kegiatan operasional dalam mengejar keuntungan tanpa campur tangan masyarakat, sepanjang kegiatan tersebut

tunduk pada regulasi pemerintah. Saat ini, masyarakat telah memiliki ekspektasi bahwa perusahaan akan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga muncul adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adanya CSR, perusahaan memiliki kewajiban kepada semua orang/pihak yang terkena dampak dari kegiatan dan kebijakan perusahaan. Menurut Kumalasari (2018) perusahaan memiliki tanggungjawab sosial kepada stakeholder dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat membuat keseimbangan peran dan hubungan antara stakeholder. CSR dapat menjadi faktor penurun tingkat manajemen laba dan penyajian kualitas informasi dapat meningkat. Penelitian yang mendukung bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba ialah Kaya & Yazan (2019) dan Gras-Gil et al. (2016). Namun hasil penelitian Wardani & Santi (2018) menunjukkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba karena manajemen perusahaan lebih leluasa melakukan tindakan manajemen laba ketika mereka berkomitmen pada CSR yang tinggi sehingga mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik dan pada akhirnya manajer memperdaya publik dengan menggunakan manajemen laba.

Umur perusahaan menggambarkan lamanya perusahaan menjalankan kegiatan operasional dan non operasional perusahaan sejak berdiri. Perhitungan umur perusahaan didapat berdasarkan akta pendirian sampai tahun penelitian yang dilakukan (Ciputra, 2015). Umur perusahaan terbagi atas perusahaan yang telah lama berdiri dan perusahaan baru berdiri. Perusahaan yang telah lama berdiri diasumsikan akan dapat menghasilkan laba lebih tinggi daripada perusahaan yang

baru berdiri (Agustia and Suryani 2018) sehingga memberi dorongan melakukan tindakan manajemen laba untuk mengurangi risiko laba masa depan yang tak terkendali (Indracahya & Faisol, 2017). Semakin lama perusahaan berdiri, semakin banyak informasi yang didapat oleh masyarakat sehingga perusahaan yang telah lama berdiri memiliki reputasi di mata masyarakat. Karakteristik perusahaan yang telah lama berdiri menurut Bassiouny, Soliman, and Ragab (2016) telah memiliki reputasi/dikenal masyarakat berkat produk dan layanan yang dihasilkan, memiliki nilai pasar yang besar, paham aturan yang mengatur praktik perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dalam tingkat rendah. Menurut Wardani & Isbela (2017) perusahaan yang telah lama berdiri dapat menangani masalah saat mengalami kesulitan karena mereka sudah mengetahui kondisi keuangan sendiri dan menghadapi masalah-masalah serta memiliki profitabilitas atau sumber pendanaan yang stabil dibanding dengan perusahaan yang baru berdiri sehingga meminimalkan tingkat manajemen laba. Fokus perusahaan yang telah lama berdiri pada mempertahankan investor dan memperbaiki kinerja perusahaan disesuaikan dengan apa yang diharapkan investor (Indracahya & Faisol, 2017). Sementara perusahaan baru berdiri menurut Indracahya & Faisol (2017) cenderung memiliki laba yang stabil untuk menarik perhatian pemegang saham dengan cara manajemen laba. Penelitian Alzoubi (2016c) dan Wardani & Isbela (2017) menyatakan bahwa secara statistic signifikan dan negatif terhadap manajemen laba. Namun, menurut Indracahya & Faisol (2017) umur perusahaan tidak ada hubungannya dengan manajemen laba dikarenakan tindakan manajemen laba dipengaruhi oleh orang/pihak manajemen, bukan lamanya umur perusahaan.

Per 1 Januari 2012, Indonesia mengadopsi standar akuntansi internasional berupa *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Adopsi standar ini diharapkan mampu menekan perilaku manajemen laba di Indonesia. IFRS merupakan standar dengan penekanan pada prinsip pencatatan dan pengakuan saat bertransaksi, sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen melalui pemilihan kebijakan yang legal untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan (Mujtahidin & Herawaty, 2016). Penelitian Mongrut and Winkelried (2018) dan Mujtahidin and Herawaty (2016) tidak mendukung karena IFRS masih belum dapat memberikan penekanan pada prinsipnya. Sedangkan penelitian Baig and Khan (2016) menyatakan bahwa IFRS memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Widayarsi, Harindahyani, and Rudiawarni (2017) menunjukkan bahwa adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap besaran manajemen laba akrual.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan melalui jumlah tenaga kerja dan jumlah utang dan tingkat penjualan (Susanti, Surya, & Sofyan, 2016), total asset dan kapitalisasi pasar (Umami, 2018), *log size* dan nilai pasar saham (Lufita & Suryani, 2018), laba yang diperoleh perusahaan (Agustina et al., 2018). Semakin besar total asset perusahaan, laba yang diperoleh dan kapasitas pasar perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut (Rice, 2016). Asset perusahaan menggambarkan suatu tingkat keamanan dalam berbisnis (Rahdal et al., 2017). Menurut UU no. 20 tahun 2008, dunia usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar.

Ukuran perusahaan dapat memperkecil adanya manajemen laba karena berbagai sebab di antaranya, perusahaan besar memiliki kemungkinan kesalahan pengungkapan total asset yang tidak dikelola dengan baik (Umami, 2018), perusahaan besar mendapat perhatian masyarakat luas yang menyebabkan perusahaan kecil melakukan manajemen laba melalui peningkatan laba untuk menarik investor dan kreditor serta perusahaan besar mendapat akses lebih besar untuk memperoleh sumber pendanaan karena memiliki probabilitas lebih besar bertahan dalam lingkungan industri (Rahdal et al., 2017), pengawasan yang lebih ketat oleh pihak luar dalam penggunaan kebijakan akuntansi di perusahaan besar (Gras-Gil et al., 2016), perusahaan besar memiliki tekanan berupa sikap kritis pemegang saham maupun pihak luar terhadap keakuratan laporan keuangan (Dimara & Hadiprajitno, 2017) yang menuntut transparansi kegiatan operasional (Rice, 2016) maka dari itu mereka lebih hati-hati dalam pelaporan keuangan (Deviyanti & Sudana, 2018). Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran yang kecil biasanya kurang menjadi perhatian publik sehingga memberi peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba agar terlihat seolah-olah perusahaan sedang berkembang (Rice, 2016) dan kinerja perusahaan yang lebih bagus (Lestari & Murtanto, 2017). Penelitian yang mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba ialah Purnama (2017), Yasser and Soliman (2018), Rahman et al. (2018), Alzoubi (2016b), Rahmando (2016), Abbadi, Hijazi, and Al-Rahahleh (2016).

Disamping itu, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar

perhatian investor yang menginginkan kondisi perusahaan yang stabil dari tahun ke tahun (Lufita & Suryani, 2018). Perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar yang memberi dorongan untuk melakukan manajemen laba daripada perusahaan kecil (Roskha et al., 2017b). Pengelolaan dan pengaturan laba dapat memperkecil biaya politik pada perusahaan besar (Pratama et al., 2016). Perusahaan besar melalui total aset, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi, dan arus kas operasi yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan manajemen laba untuk mencapai target pendapatan tertentu (Alzoubi, 2016c). Penelitian Widayarsi, Harindahyani, and Rudiawarni (2017), Asward and Lina (2015), Alzoubi (2016a) juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Di sisi lain, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar mempunyai sedikit motivasi untuk melakukan manajemen laba (Aorora, 2018). Perusahaan yang besar akan menjadi sorotan masyarakat dan pemerintah sehingga untuk menjaga kredibilitasnya maka perusahaan tidak melakukan manajemen laba (Purbandari & Immanuela, 2018). Perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan tetap memiliki kemungkinan untuk melakukan manajemen laba ketika pengawasan yang dilakukan kurang mendukung sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Agustina et al., 2018). Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan oleh pengawasan yang ketat dari pemerintah, analis, dan investor yang ikut menjalankan perusahaan

menyebabkan manajer tidak berani untuk melakukan praktik manajemen laba (Agustia and Suryani 2018).

Menurut Indracahya & Faisol (2017) ukuran perusahaan bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi sehingga tindakan melakukan manajemen laba dilakukan oleh orang/manajemen didasarkan selain ukuran perusahaan. Perusahaan dengan asset kecil ataupun besar memiliki tujuan yang sama sehingga tidak ada indikasi perusahaan yang lebih besar akan mengurangi dan berhati-hati pada praktik manajemen laba (Mujtahidin & Herawaty, 2016). Ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin dapat mempengaruhi atau meminimalkan manajemen laba pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (Pasilongi et al., 2018). Besar atau kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi tingkat manajemen laba karena pengawasan ketat dari pemerintah dan publik (Wardani & Isbela, 2017).

Setiap laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pasti memiliki laporan auditor yang dihasilkan dari Kantor Akuntan Publik. Auditor dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ISA dan kode etik audit sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan bahwa penyajian laporan keuangan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi dan wajar. Kehadiran pihak ketiga yaitu auditor yang memiliki sikap independen dan mengikuti perkembangan akuntansi menjadi penyambung antara principal dan agen untuk mengurangi adanya masalah agensi dan dapat mendeteksi manajemen laba. KAP dapat memberikan *assurance* tentang asersi laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat luas.

Ukuran KAP terbagi atas KAP *big four* dan *non big four*. KAP *big four* meliputi Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCooper. KAP *big four* lebih memiliki reputasi, kredibilitas, teknologi, pengalaman, modal, sumber daya manusia yang tinggi untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih tinggi dibanding KAP *non big four*. Pemilihan ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan kebijakan perusahaan karena bersangkutan dengan biaya audit. KAP *big four* memiliki nilai kontrak dan biaya audit lebih besar dibanding kantor akuntan publik *non-big four* (Prakoso & Purwanto, 2017). Kualitas audit diproksikan independensi auditor dan ukuran audit (Alzoubi, 2016a), spesialisasi industri (Yasser & Soliman, 2018). Faranita & Darsono (2017) menyatakan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba sedangkan penelitian Alzoubi (2016a) menyatakan bahwa ada hubungan negatif signifikan antara independensi auditor dan *earnings management*.

Penelitian yang mendukung bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap manajemen laba adalah Rahdal, Zulfahridar, and Yasni (2017), Dimara & Hadiprajitno (2017), Alzoubi (2016a), Alzoubi (2016b), Mongrut and Winkelried (2018), Alzoubi (2016c), Pasilongi, Nazar and Aminah (2018), Widayarsi, Harindahyani, and Rudiawarni (2017). Namun menurut Yasser and Soliman (2018) dan Sihombing and Laksito (2017) masing-masing menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara spesialisasi industri, reputasi KAP dan akrual diskresioner. Perusahaan yang memiliki keinginan untuk melakukan tindakan manajemen laba dapat mengabaikan KAP *big four* (Lestari & Murtanto,

2017). Penelitian lain yang menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan ialah Marsha and Ghozali (2017), Prakoso and Purwanto (2017), Lestari & Murtanto (2017), Nasution, Nazar, and Aminah (2018), Purbandari & Immanuela (2018), Lufita and Suryani (2018).

Definisi audit internal menurut Lembaga Auditor Internal (IIA) adalah kegiatan konsultasi independen dan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Auditor internal merupakan salah satu internal governance yang mana mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan manajemen risiko, kontrol dan tata kelola (Abedalqader et al., 2016) berkonsentrasi pada transparansi dan kepercayaan kinerja sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Penelitian Abedalqader, Abdulmohsen, and Alssad (2016) menyatakan bahwa pengaruh audit internal pada discretionary accruals sangat kecil, negatif dan tidak signifikan secara spesifik.

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992, corporate governance didefinisikan sebagai perangkat aturan yang mengatur hubungan semua stakeholder baik internal stakeholder maupun external stakeholder yang terkait hak-hak dan kewajiban mereka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan yang dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan. Peningkatan kualitas laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan yang baik diharapkan dapat menghambat/meminimalisir perilaku manajemen laba (Fatmawati, 2016).

Menurut Abedalqader et al. (2016) tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang mana di dalamnya terdapat orang, proses dan kegiatan untuk memastikan pengelolaan asset dengan benar sehingga dapat memantau kegiatan manajemen. Adanya corporate governance dapat meningkatkan kinerja manajemen dan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder. Tujuan Corporate Governance adalah untuk mengurangi perbedaan persepsi antara pemegang saham (sebagai principal) dengan manajemen perusahaan (sebagai agen), yang dimana perbedaan tersebut dapat mengakibatkan tindakan yang illegal atau tidak etis seperti manajemen laba. Prinsip corporate governance menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance), yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*.

Penerapan mekanisme *corporate governance* berupa struktur kepemilikan, kepemilikan terkonsentrasi, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, auditor eksternal. Penelitian yang mendukung bahwa corporate governance berpengaruh negatif signifikan ialah Abbadi, Hijazi, and Al-Rahahleh (2016), Indracahya & Faisal (2017), Mujtahidin and Herawaty (2016). Namun penelitian Chairunesia, Sutra, & Wahyudi (2018) menyatakan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Persentase dan komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal dapat menunjukkan faktor penting dalam struktur modal selain hutang dan ekuitas yang dapat mengurangi masalah keagenan

(Susanti et al., 2016). Menurut Agustina, Sulia, and Rice (2018) struktur kepemilikan merupakan salah satu indikator penerapan corporate governance, karena di dalamnya terdapat kepemilikan yang dimiliki oleh pihak manajer atau insititusal. Struktur kepemilikan berperan sebagai alat pemantauan untuk mengurangi manajemen laba dan pada akhirnya dapat meningkatkan *financial reporting quality* (Alzoubi, 2016c). Selain kepemilikan manajerial dan institusional, struktur kepemilikan saham perusahaan dibagi menjadi pemegang blok eksternal, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing (Alzoubi, 2016c), kepemilikan terkonsentrasi (Lestari & Murtanto, 2017). Menurut Agustina, Sulia, and Rice (2018) untuk mengeksplorasi struktur kepemilikan di antaranya kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan asing, domestik dan manajerial, ditambah kepemilikan pemerintah menurut Alzoubi (2016c).

Salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan adalah memberikan kompensasi manajer melalui kepemilikan saham perusahaan. Masalah keagenan akan berkurang jika manajer adalah seseorang yang bertindak sebagai agen sekaligus *principal* dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan jika manajemen memenuhi kepentingan pemegang saham (Putra et al., 2018) serta bertindak untuk memastikan kontrak berjalan efisien, penyajian laporan keuangan yang wajar, serta memberikan laporan keuangan yang berkualitas (Pratama et al., 2016).

Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik yang dapat menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap penerapan metode akuntansi (Susanti et al., 2016). Kepemilikan

manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan (dewan direksi, dewan komisaris). Ketika kepemilikan manajerial rendah, manajer perusahaan tidak memiliki hak dan voting yang besar dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan rasa memiliki manajer atas perusahaan sebagai pemegang saham tidak cukup kuat dan tidak mampu memotivasi manajer untuk berusaha lebih giat dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Abduh & Rusliati, 2018). Menurut Alzoubi (2016c) persentase kepemilikan manajerial akan mengurangi manajemen laba dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian yang mendukung bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba adalah Dimara & Hadiprajitno (2017), Roskha et al. (2017), Putra, Kristianti, and Aminah (2018), Nia et al. (2017), Alzoubi (2016c), Purnama (2017), Lestari & Murtanto (2017), Alzoubi (2016b).

Namun, penerapan mekanisme kepemilikan manajerial kurang memberikan kontribusi dalam mengendalikan manajemen laba (Boediono, 2005). Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer memiliki kepentingan baru yaitu mendapatkan return hasil dari kepemilikan sahamnya sehingga manajer memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan karena manajer memiliki lebih banyak informasi perusahaan sehingga pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan mengendalikan tindakan manajer (Asward & Lina, 2015). Hasil penelitian Asward & Lina (2015), Aorora (2018), Ogbonnaya et al. (2016), Susanti et al. (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Menurut Faranita & Darsono (2017) rendahnya jumlah saham yang dimiliki oleh manajer tidak menurunkan niat manajer untuk melakukan manajemen laba dan tidak menjadikan kepentingan pemegang saham dan manajer menjadi sejajar, karena kurang berperan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Abduh and Rusliati (2018), Prakoso and Purwanto (2017), Faranita & Darsono (2017), Pratama et al. (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan (misal perusahaan asuransi, investasi, dana pensiun, bank, reksa dana, lembaga jaminan sosial) yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pihak eksternal dapat mendorong peningkatan pengawasan kinerja manajemen. Menurut Asward and Lina (2015) investor institusional dianggap mempunyai kemampuan monitoring tindakan manajemen lebih baik daripada investor individual, disamping itu menurut Asward and Lina (2015) terdapat dua penggolongan investor institusional yaitu investor institusional sebagai pemilik sementara yang lebih memfokuskan pada laba sekarang yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan investor institusional sebagai investor yang berpengalaman yang lebih memfokuskan pada laba masa datang yang relatif lebih besar dari laba sekarang.

Investor yang lebih memfokuskan pada laba sekarang membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba para investor sehingga manajer cenderung melakukan tindakan manajemen laba melalui peningkatan laba jangka

pendek. Hal ini menyebabkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba seperti hasil penelitian Asward & Lina (2015), Puspitasari et al. (2019), Isenmila & Elijah (2012), Jao & Pagalung (2011)

Penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berhubungan signifikan dan negatif dengan manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan institusional melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat di dalam perusahaan mengakibatkan manajer memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengatur laba (Agustina et al., 2018) sehingga membatasi perilaku manajerial earnings management (Alzoubi, 2016b) dan membuat manajemen lebih fokus meningkatkan kinerja perusahaan (Roskha et al., 2017b). Hal ini sejalan dengan penelitian Mongrut and Winkelried (2018).

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena proporsi kepemilikan saham institusional yang tidak stabil sehingga tidak ada pengaruh kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusional terhadap pengawasan tindakan pihak internal perusahaan dalam melakukan kecurangan mengenai informasi laba (Purnama, 2017). Investor institusional selain *sophisticated investors* tidak memiliki kemampuan dan kesempatan lebih besar untuk monitoring manajer melainkan berperan sebagai pemilik sementara yang lebih fokus pada *current earnings* (Pratama et al., 2016). Investor institusional cenderung fokus pada tujuan laba jangka pendek yang mendorong manajer terlibat manajemen laba agar terlihat peningkatan laba jangka pendek (Lemma et al., 2018), serta adanya berbagai jenis investor institusi yang tidak peduli kualitas laba perusahaan (Nia et

al., 2017). Proporsi hak suara yang dimiliki oleh institusi tidak dapat mempengaruhi tingkat manajemen laba (Lestari & Murtanto, 2017). Namun menurut Purbandari & Immanuela (2018) kepemilikan institusional yang tinggi tidak berfokus pada laba jangka pendek sehingga tidak mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen laba. Penelitian Aorora (2018) juga menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kepemilikan asing merupakan salah satu elemen struktur kepemilikan pada perusahaan. Kepemilikan saham oleh asing akan meningkatkan pengetahuan akuntansi dan tata kelola perusahaan yang dapat mengawasi sistem pelaporan keuangan dan kegiatan operasi yang dihitung dengan menjumlahkan persentase kepemilikan saham oleh investor asing institusional dan individu (Faranita & Darsono, 2017). Penelitian yang dilakukan Nia et al. (2017) dan Alzoubi (2016c) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian Faranita & Darsono (2017) menyatakan bahwa pemegang saham asing tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena jarak antar Negara akan membuat investor asing sulit mengawasi secara aktif dan langsung sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi dapat menyebabkan manajemen laba.

Kepemilikan publik merupakan persentase saham yang ditawarkan kepada publik. Menurut Agustina, Sulia, & Rice (2018) kepemilikan publik berpengaruh terhadap manajemen laba sehingga semakin besar persentase saham yang dimiliki publik, semakin besar informasi yang harus disajikan oleh manajer kepada publik yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Manajer memiliki

tanggungjawab untuk memberikan informasi secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawabannya sehingga dapat menurunkan tingkat manajemen laba karena terdapat monitoring dari investor publik. Sementara menurut Purbandari & Immanuela (2018) persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat perusahaan melakukan IPO tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena perusahaan tidak menentukan harga saham berdasarkan laba perusahaan.

Bentuk struktur kepemilikan yang lain adalah konsentrasi kepemilikan yang meliputi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan tersebar. Kepemilikan terkonsentrasi ialah sebagian kecil individu/kelompok investor yang memiliki sebagian besar saham perusahaan sehingga jumlah saham yang dimiliki lebih dominan dibanding pemegang saham lainnya. Hal ini dapat dijadikan monitoring internal untuk mengurangi tindakan manajemen laba. Pemegang saham yang memiliki kepemilikan besar dapat dengan mudah untuk mengakses informasi apapun untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.

Menurut Asward & Lina (2015) Indonesia merupakan Negara dengan derajat perlindungan investor rendah, pemegang saham khawatir dengan kemungkinan pendapatan yang diperoleh dengan yang diekpektasikan akan berbeda sehingga mereka akan memperbesar persentase kepemilikan mereka untuk melindungi diri dari ketidakpastian tersebut. Selain itu, kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi konflik keagenan, karena dengan kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan, mereka mendapatkan posisi yang kuat untuk mengendalikan manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Hasil penelitian Lestari & Murtanto (2017) dan Asward & Lina (2015) menyatakan bahwa

kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian Widyaningsih (2017) memberikan hasil bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba, karena dengan kepemilikan saham di atas 25% dapat mendorong manajemen untuk mengatur laba. Semakin banyak kepemilikan saham yang dimiliki pada suatu perusahaan, maka semakin banyak kesempatan dan insentif untuk mengambil alih sumberdaya perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Akibatnya pemegang saham mayoritas memiliki akses untuk mempengaruhi keputusan manajerial yang sering merugikan dan melanggar akuntabilitas dan keadilan pemegang saham minoritas (Sulistyanto, 2008).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 adalah “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris untuk menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan yang beranggotakan minimal 3 orang dan mengadakan rapat minimal 4 kali dalam satu periode. Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dengan perusahaan, dewan komisaris dengan internal auditor (Fatmawati, 2016) serta menjembatani pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Putra et al., 2018). Frekuensi pertemuan yang rutin dapat mengurangi tindakan manajemen laba (Lufita & Suryani, 2018). Semakin banyak frekuensi pertemuan, semakin aktif dan sering komite audit melakukan evaluasi monitoring para manajemen untuk tidak

melakukan tindakan yang oportunistik. Kehadiran komite audit pada suatu perusahaan dapat dilihat di *annual report* perusahaan tersebut.

Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit dibentuk untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan direksi perusahaan kepada para pemegang saham. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) (Aorora, 2018), mengawasi kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan (Dimara & Hadiprajitno, 2017). Apabila komite audit secara terus menerus melakukan pemeriksaan dapat menghambat manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dalam bentuk manajemen laba (Roskha et al., 2017b). Penelitian yang mendukung komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba adalah Marsha and Ghozali (2017), Alzoubi (2016a), Alzoubi (2016b), Alzoubi (2016c), Zgarni et al. (2016), Sihombing and Laksito (2017), Abduh and Rusliati (2018), Prabowo (2017).

Selain itu, beberapa penelitian menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut Putra et al. (2018), posisi komite audit terletak dibawah dewan komisaris pada struktur perusahaan sehingga komite audit sulit bekerja secara profesional karena bekerja didasarkan pada kedekatan dewan komisaris. Komite audit bukan satu-satunya penentu efektivitas pengawasan manajemen perusahaan (Agustina et al., 2018). Notulensi rapat komite audit tidak berfokus pada masalah-masalah good corporate governance, maka rapat yang dilakukan komite audit belum dapat meminimalkan manajemen laba (Narolita &

Krisnadewi, 2016). Keahlian komite audit di bidang akuntansi dan keuangan di perusahaan kurang menunjang dalam pengawasan yang dilakukan (Sihombing & Laksito, 2017) dan keahlian ini hanya bersifat mandatory agar memenuhi peraturan (Lestari & Murtanto, 2017). Penelitian lain menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, antara lain Basyirun (2018), Aorora (2018), Abedalqader, Abdulmohsen, and Alssad (2016), Fatmawati (2016), Prakoso and Purwanto (2017).

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada dan direksi. Sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, dewan komisaris memiliki peran penting dalam pelaksanaan *good corporate governance*, dimana dewan komisaris tidak memiliki ikatan dengan manajemen perusahaan sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dewan komisaris terhadap direksi diharapkan dapat menjadi lebih objektif. Dewan komisaris dapat mengakses informasi perusahaan untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya atas pengawasan kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga mampu mendeteksi adanya tindakan manajemen laba. Penelitian yang mendukung bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif pada manajemen laba ialah Narolita and Krisnadewi (2016), Alzoubi (2016), Alzoubi (2016c), Daghnsni et al. (2016), Lestari & Murtanto (2017), Asward & Lina (2015), Abduh & Rusliati (2018).

Namun, adanya anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004, yaitu mewajibkan perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari anggota dewan komisaris, tanpa maksud untuk menegakkan corporate governance. Selain itu, kuatnya pemegang saham mayoritas yang masing memegang peranan penting dapat menyebabkan kinerja dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al. (2019) dan Sutino & Khoiruddin (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aorora (2018), Purbandari & Immanuela (2018), Roskha et al. (2017), Agustina, Sulia, and Rice (2018), Nasution et al. (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Menurut Putra et al. (2018) dewan komisaris independen belum dapat menerapkan *good corporate governance* dengan baik karena lemahnya kemampuan dan integritas mereka dalam mengawasi kinerja manajemen sehingga dewan komisaris independen tidak benar-benar independen dan tidak dapat melaksanakan tugas serta tanggungjawab secara optimal.

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih dan diangkat oleh pemegang saham untuk bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Dewan

direksi bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Fatmawati, 2016). Semakin banyak jumlah dewan direksi satu perusahaan, maka komunikasi dan koordinasi lebih terjalin dengan pihak manajemen sehingga pelaksanaan *corporate governance* berjalan baik, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan yang dapat menekan praktik manajemen laba semakin rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Riadiani & Wahyudin (2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbandari & Immanuela (2018), Fatmawati (2016), Abedalqader et al. (2016) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dikarenakan jika dewan direksi dalam suatu perusahaan terlalu banyak, kinerja dewan direksi tidak akan terkontrol secara baik sehingga besar kemungkinan untuk melakukan kecurangan, namun jika dewan direksi tidak terlalu banyak, kinerja dewan direksi akan lebih efisien baik dari segi pekerjaan maupun upah.

Pengukuran tingkat persaingan pasar produk menggunakan Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Industry Lerner Index (INDUSTRY LI), dan inverse of the number of firms in an industry (NUMB) (Lemma et al., 2018) serta indeks saham (Brigita & Adiwibowo, 2017). Penelitian Lemma et al. (2018), Widuri & Sutanto (2019), Kordestani and Mohammadi (2016) menyatakan bahwa persaingan pasar produk dengan proksi Herfindahl-Hirschman Index secara signifikan positif dengan manajemen laba akrual, namun tidak signifikan secara statistik untuk proksi Industry Lerner Index dan inverse of the number of firms in an industry (NUMB). Penelitian Brigita & Adiwibowo (2017) menyatakan tidak terdapat pengaruh

signifikan antara persaingan pasar dengan manajemen laba karena perusahaan-perusahaan yang berada pada lingkungan industri yang sama akan tetap berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya.

Perusahaan harus mempertimbangkan lingkungan kompetisi untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Persaingan pasar dapat menentukan perusahaan bertahan di pasar atau tidak. Semakin ketat persaingan dalam suatu lingkungan industri, laba perusahaan akan semakin rendah disebabkan banyaknya produk sejenis yang ditawarkan di pasar (Brigita & Adiwibowo, 2017). Persaingan pasar yang lebih tinggi mengancam perusahaan dilikuidasi, mendorong perusahaan melakukan manipulasi kinerja keuangan jangka pendek untuk mendapatkan pendanaan eksternal dan bertahan di lingkungan kompetitif.

Dalam memenangkan kondisi pasar yang kompetitif, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif yang unggul dibanding yang lain. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus bisa menganalisis, mengidentifikasi, mengembangkan keunggulan bisnisnya melalui strategi bisnis. Strategi bisnis mencakup serangkaian keputusan manajemen untuk dapat bersaing dalam suatu industri dan memasarkan produknya (Widyasari et al., 2017).

Strategi bisnis yang umum digunakan oleh perusahaan menggunakan strategi kepemimpinan biaya rendah, diferensiasi produk, fokus pada ceruk pasar, memperkuat hubungan customer dan supplier. Strategi bisnis kepemimpinan berbiaya rendah (*low-cost leadership*) menggunakan biaya operasional terendah dan harga terendah yang memiliki sistem respons pelanggan yang efisien dimana menghubungkan perilaku konsumen dengan distribusi dan produksi. Pengukuran

strategi kepemimpinan biaya menurut Brigita & Adiwibowo (2017) dapat menggunakan *assets turnover* (perputaran asset). Penelitian yang menyatakan bahwa strategi kepemimpinan biaya berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba adalah (Brigita & Adiwibowo, 2017). Strategi bisnis diferensiasi produk digunakan perusahaan berfokus pada profit margin jangka panjang dengan menciptakan produk dan layanan baru berkualitas tinggi yang disesuaikan dan dipersonalisasi sesuai kebutuhan pelanggan, mengubah kenyamanan pelanggan secara drastis dalam menggunakan produk dan layanan yang lama. Perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi melakukan investasi pada kegiatan *Research and Development* yang membutuhkan teknologi, asset, pekerja berpendidikan tinggi (Widuri & Sutanto, 2019). Pengukuran strategi diferensiasi produk menurut Brigita & Adiwibowo (2017) menggunakan profit margin. Menurut Widuri & Sutanto (2019) dan Brigita & Adiwibowo (2017) strategi diferensiasi memiliki hubungan signifikan negatif dengan manajemen laba karena pendanaan tinggi yang didapat dari luar akan memotivasi manajemen melakukan manajemen laba. Penelitian Widiyasari, Harindahyani, and Rudiawarni (2017) dan Wardani & Isbela (2017) menyatakan bahwa strategi bisnis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba akrual.

Menurut Sembiring & Nahumury (2018) *internal governance* (tata kelola internal) merujuk pada anggota eksekutif yang posisinya berada di bawah posisi CEO yang disebut dengan *Key Subordinate Executive (KSE)* yang memberikan *checks and balances* dalam organisasi perusahaan yang dapat mempengaruhi dan melaksanakan hasil pengambilan keputusan oleh CEO meliputi *Chef Financial*

Officer (CFO), Chief Commercial Officer (CCF), Chief Operating Officer (COO), Chief Technical Officer (CTO). Penelitian Sembiring & Nahumury (2018) menyatakan internal governance berpengaruh signifikan negatif terhadap manipulasi laba aktivitas riil.

*Top management* atau manajemen puncak merupakan manajemen tertinggi dalam tingkatan manajerial yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan, keputusan dan strategi perusahaan secara umum dan bersifat jangka panjang, termasuk strategi pelaporan keuangan perusahaan. Antar *top management* ini mengadakan komunikasi dan kemudian membentuk tim agar tetap solid dalam membuat keputusan, karena hasil dari kinerja manajemen tingkat dibawahnya adalah tanggungjawab *top management*. Menurut Hsieh et al. (2018) kualitas *top management team* dipengaruhi oleh karakteristik pribadi manajemen puncak, meliputi tingkat pendidikan, keahlian akuntansi, pengalaman kerja yang relevan yang dimiliki oleh *top management*. Penelitian Li et al. (2016) dan Hsieh et al. (2018) menyatakan bahwa karakteristik *top management team* (persentase anggota *top management team* bergelar master, persentase anggota *top management team* yang merupakan akuntan publik bersertifikat, dan persentase anggota *top management team* yang pernah menjabat *top management* sebelumnya) secara signifikan berpengaruh negatif terkait dengan manajemen laba.

Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan, hasil yang menunjukkan kekonsistenan faktor yaitu kepemilikan publik dari penelitian Purbandari & Immanuela (2018) dan Agustina, Sulia, & Rice (2018), umur perusahaan dari penelitian Alzoubi (2016c), Wardani & Isbela (2017), Indracahya & Faisol (2017),

*internal governance* dari penelitian Sembiring & Nahumury (2018), persaingan pasar produk dari penelitian Lemma et al. (2018), Widuri & Sutanto (2019), Kordestani and Mohammadi (2016), kepemilikan asing dari penelitian Faranita & Darsono (2017), Nia et al. (2017), audit internal dari penelitian Abedalqader, Abdulmohsen, and Alssad (2016), strategi bisnis dari penelitian Brigita & Adiwibowo (2017), Wardani & Isbela (2017), Widyasari et al. (2017), kualitas *top management team* dari penelitian Li et al. (2016) dan Hsieh et al. (2018).

Faktor ketidakkonsistenan akan hasil penelitian pendahulu meliputi variabel profitabilitas dari penelitian Wardani & Isbela (2017), Windra et al. (2018), Abbadi, Hijazi, and Al-Rahahleh (2016), leverage dari penelitian Purnama (2017), Indracahya & Faisol (2017), Mujtahidin and Herawaty (2016), ukuran perusahaan dari penelitian Pratama et al. (2016), Rahdal, Zulfahridar, and Yasni (2017), Indracahya & Faisol (2017), komite audit dari penelitian Purbandari & Immanuela (2018), Alzoubi (2016a), kualitas audit dari penelitian Faranita & Darsono (2017), Alzoubi (2016a), Yasser & Soliman (2018), adopsi IFRS dari penelitian Mongrut & Winkelried (2018), Mujtahidin & Herawaty (2016), Widyasari et al. (2017), kepemilikan manajerial dari penelitian Asward & Lina (2015), Dimara & Hadiprajitno (2017), Abduh and Rusliati (2018), kepemilikan institusional dari penelitian Asward & Lina (2015), Purnama (2017), Agustina et al. (2018), kepemilikan terkonsentrasi dari penelitian Widyaningsih (2017) dan Asward & Lina (2015), Lestari & Murtanto (2017), dewan komisaris independen dari penelitian Puspitasari et al. (2019), Abduh & Rusliati (2018), dan Roskha et al. (2017), dewan direksi dari penelitian Riadiani & Wahyudin (2015), Purbandari &

Immanuela (2018), Fatmawati (2016), *corporate governance* dari penelitian Indracahya & Faisol (2017), Chairunesia et al. (2018), CSR dari penelitian Wardani & Santi (2018), Kaya & Yazan (2019), Gras-Gil et al. (2016). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut tidak konsisten karena terdapat perbedaan arah pengaruh terhadap manajemen laba.

Terdapat kelemahan-kelemahan pada penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Faranita & Darsono (2017) yang menyatakan bahwa pengukuran independensi auditor dengan menggunakan proksi biaya audit merupakan sebuah kelemahan, kemudian menyarankan untuk menggunakan proksi lain yang lebih tepat untuk mengukur independensi auditor. Menurut Fatmawati (2016) perhitungan komite audit sebaiknya tidak dihitung melalui latar belakang akuntansi anggota komite audit. Menurut Dimara & Hadiprajitno (2017) perhitungan manajemen laba dengan menggunakan model modified Jones telah banyak digunakan sedangkan menurut Alzoubi (2016a) dan Alzoubi (2016b) model Jones yang dimodifikasi (*Modified Jones Model*) memiliki kelemahan.

Penelitian Nasution, Nazar, and Aminah (2018) dan Pasilongi, Nazar and Aminah (2018) menyarankan menambah dan menguji variabel lain seperti komite audit. Kamil and Ariyani (2017) dan Nasution et al. (2018) menyarankan untuk menambah variabel ukuran perusahaan. Pasilongi et al. (2018), Fatmawati (2016) menyarankan untuk menguji variabel leverage. Nasution et al. (2018), Purbandari & Immanuela (2018) menyarankan agar menambah variabel lain seperti profitabilitas. Kamil and Ariyani (2017) menyarankan untuk menguji CSR. Kamil and Ariyani (2017), Dimara & Hadiprajitno (2017) dan Widayarsi, Harindahyani,

and Rudiawarni (2017) menyarankan untuk menggunakan beberapa pengukuran manajemen laba selain *modified Jones model*. Kamil and Ariyani (2017) dan Pasilongi, Nazar and Aminah (2018) menyarankan untuk meneliti struktur kepemilikan. Diperkuat oleh saran dari penelitian Agustina, Sulia, and Rice (2018) untuk mengeksplorasi struktur kepemilikan selain kepemilikan institusional dan kepemilikan publik seperti kepemilikan asing, domestic dan manajerial, ditambah kepemilikan pemerintah yang merupakan saran dari penelitian Alzoubi (2016c). Umami (2018) menyarankan menggunakan variabel *good corporate governance* dengan ukuran lainnya seperti komisaris independen, komite audit, dan lain-lain.

Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten atas saran yang diberikan peneliti sebelumnya meliputi: variabel komite audit dengan menggunakan jumlah intensitas rapat komite audit yang merupakan saran dari Asward and Lina (2015), variabel kualitas audit atas saran dari Faranita & Darsono (2017), variabel ukuran perusahaan atas saran dari Kamil and Ariyani (2017) dan Nasution, Nazar, and Aminah (2018), variabel leverage atas saran dari Pasilongi, Nazar and Aminah (2018) dan Fatmawati (2016), variabel CSR atas saran dari Kamil and Ariyani (2017). Selain itu, peneliti tertarik untuk membandingkan model pengukuran manajemen laba *modified Jones Model* dengan model lain seperti yang telah disarankan oleh Kamil and Ariyani (2017), Dimara & Hadiprajitno (2017) dan Widayarsi, Harindahyani, and Rudiawarni (2017).

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan yang timbul akibat kontrak antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*). Tiga asumsi dasar yang menjelaskan sifat manusia adalah daya pikir manusia yang terbatas tentang persepsi masa yang akan datang, pada umumnya manusia mementingkan diri sendiri dan manusia cenderung menghindari risiko. Manajer akan bertindak *opportunistic* untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri dengan berusaha keras memaksimalkan utilitas nya sendiri dan perusahaan melalui manajemen laba. *Principal* merekrut *agent* untuk mengelola perusahaan termasuk pengambilan keputusan bisnis. Manajer (*agent*) sebagai pihak yang didelegasikan wewenang tanggungjawab pengelolaan perusahaan berkewajiban menyediakan laporan keuangan yang cenderung mengorbankan kepentingan pemegang saham dan terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena manajer memiliki informasi terkait perusahaan lebih banyak dibanding pemegang saham atau sering disebut dengan asimetri informasi. Menurut Mujtahidin & Herawaty (2016) Semakin tinggi asimetri informasi, mendorong manajer melakukan tindakan manajemen laba. Perbedaan kepentingan dimana *principal* menginginkan perusahaan *going concern* dan mendapat return lebih banyak dari ekspektasi investasi mereka, sedangkan *agent* menginginkan memperoleh kompensasi tinggi atas penghargaan kinerjanya memunculkan konflik kepentingan atau *agency problem*. Mekanisme pengawasan dapat menyejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan dan perilaku *opportunistic*.

### 2.2.2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) terdapat tiga hipotesis teori akuntansi positif yang menjadi latar belakang munculnya manajemen laba yaitu *bonus plan hypothesis* dimana manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba pada periode yang akan datang ke periode sekarang demi kompensasi tinggi yang diperoleh, *Debt (equity) hypothesis* dimana manajer memilih metode akuntansi yang menghindari dari pelanggaran kontrak utang, dan *Political cost hypothesis* dimana manajer akan memilih metode akuntansi agar laba turun karena laba yang tinggi akan mempengaruhi tindakan pemerintah. Menurut Purnama (2017) teori akuntansi positif menjelaskan hubungan hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik (*bonus plan hypothesis*), hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur (*debt to equity hypothesis*), hubungan keagenan antara manajer dan pemerintah (*political cost hypothesis*). Teori akuntansi positif diartikan bahwa *agent* dapat memilih kebijakan akuntansi dalam kondisi tertentu (misal respon atas standar akuntansi baru) yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri bersifat *opportunistic*. Pemilihan kebijakan akuntansi antar perusahaan berbeda sesuai kondisi yang dihadapi perusahaan tersebut. Teori akuntansi positif sebagai pedoman bagi lembaga penyusun standar akuntansi, memberi kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak ada standar resminya, dan meningkatkan pemahaman, keyakinan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Suwardjono, 2005).

### 2.2.3. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dimana perusahaan berada. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, sehingga apa yang dilakukan perusahaan akan kembali pada masyarakat tersebut. Selain itu, perusahaan mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat sekitar tempat dimana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan menggunakan sumber ekonominya. Sebagaimana yang dimaksud dengan kontrak sosial menurut Shocker & Sethi (1974) adalah secara eksplisit maupun implisit, kelangsungan hidup dan pertumbuhan masyarakat di sekitar perusahaan didasarkan pada hasil akhir (output) yang secara sosial diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial, lingkungan. Perusahaan secara berkelanjutan memastikan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya melalui kegiatan CSR, sehingga aktivitas perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang sah. Dukungan lingkungan masyarakat yang kondusif merupakan hal yang penting untuk mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lancar tanpa gangguan. Semakin banyak perusahaan melakukan kegiatan CSR yang berdampak positif bagi masyarakat, maka akan memberikan manfaat dan kemajuan bagi perusahaan. Pengungkapan CSR bertujuan untuk melaporkan kepada masyarakat luas (Stakeholder) tentang aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat tersebut.

#### **2.2.4. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

Teori stakeholder menjelaskan bahwa stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan, berupa pembatasan pemakaian sumber ekonomi pada modal dan tenaga kerja, akses terhadap media, konsumsi atas barang/jasa yang dihasilkan perusahaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan akan berusaha memuaskan keinginan stakeholder untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan mendapatkan modal tersebut melalui manajemen laba (Indracahya & Faisol, 2017). Menurut Thinh & Tan (2019) manajer memainkan peran penting untuk melindungi kepentingan semua pihak. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial untuk membina hubungan jangka panjang dengan para stakeholder daripada memaksimalkan keuntungan jangka pendek mereka (Gras-Gil et al., 2016).

Manajer dapat melakukan manipulasi laba untuk meningkatkan kepentingan dan keuntungan pribadi atas biaya pemegang saham dan juga stakeholder lainnya (Bassiouny et al., 2016). Menurut Kumalasari (2018) terdapat 2 kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pihak *internal stakeholder* meliputi pemegang saham, pemilik bisnis, manajer. Pihak *external stakeholder* meliputi pemerintah, masyarakat, *customer*, *supplier*, *competitor*, pemerintah, investor, komunitas lokal di suatu daerah dan lain-lain.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba**

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992, *corporate governance* didefinisikan sebagai perangkat

aturan yang mengatur hubungan semua stakeholder baik internal stakeholder maupun external stakeholder terkait hak-hak dan kewajiban mereka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan yang dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan. Peningkatan kualitas laporan keuangan menggambarkan kinerja perusahaan yang baik diharapkan dapat menghambat/meminimalisir perilaku manajemen laba (Fatmawati, 2016).

Menurut Abedalqader et al. (2016) tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang mana di dalamnya terdapat orang, proses dan kegiatan untuk memastikan pengelolaan asset dengan benar sehingga dapat memantau kegiatan manajemen. Adanya corporate governance dapat meningkatkan kinerja manajemen dan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*. *Corporate governance* merupakan penciptaan kondisi perusahaan yang baik melalui pengendalian pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan sehingga diharapkan mampu meminimalisir manajemen laba (Asward & Lina, 2015).

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dengan agent dikarenakan *principal* menginginkan perusahaan *going concern* dan mendapat *return* lebih banyak dari ekspektasi investasi mereka, sedangkan *agent* menginginkan memperoleh kompensasi tinggi atas penghargaan kinerjanya yang dapat memunculkan konflik kepentingan atau *agency problem*. Manajer terkadang menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena manajer memiliki informasi perusahaan lebih banyak dibanding dengan pemegang saham atau sering disebut informasi asimetri.

Mekanisme pengawasan atau monitoring melalui *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi perbedaan persepsi antara pemegang saham (sebagai principal) dengan manajemen perusahaan (sebagai agen), yang dimana perbedaan tersebut dapat mengakibatkan tindakan yang illegal atau tidak etis seperti manajemen laba. Prinsip corporate governance menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance), yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*. Penerapan mekanisme corporate governance pada penelitian ini berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, auditor eksternal.

Struktur kepemilikan merupakan persentase dan komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal. Struktur kepemilikan menunjukkan faktor penting dalam struktur modal selain hutang dan ekuitas yang dapat mengurangi masalah keagenan (Susanti et al., 2016). Menurut Agustina, Sulia, and Rice (2018) struktur kepemilikan merupakan salah satu indikator penerapan corporate governance, karena di dalamnya terdapat kepemilikan yang dimiliki oleh pihak manajer atau insititusal. Struktur kepemilikan berperan sebagai alat pemantauan untuk mengurangi manajemen laba dan pada akhirnya dapat meningkatkan *financial reporting quality* (Alzoubi, 2016c). Struktur kepemilikan pada penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi.

Kepemilikan manajerial adalah sejumlah saham perusahaan yang dimiliki manajer. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu alat pemantauan untuk mengurangi manajemen laba. Berkaitan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat *agency problem* di dalam hubungan antara agent dan principal, kepemilikan manajerial dapat mengurangi *agency problem*. Adanya kepemilikan manajerial, manajer akan berusaha memenuhi kepentingan pemegang saham karena manajer bertindak sebagai agen sekaligus principal dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan serta bertindak untuk memastikan kontrak berjalan efisien dan penyajian laporan keuangan yang wajar, serta memberikan laporan keuangan yang berkualitas (Pratama et al., 2016). Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik yang dapat menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap penerapan metode akuntansi (Susanti et al., 2016). Kehadiran kepemilikan saham oleh manajer mengakibatkan manajer dapat mengurangi aktivitas manajemen laba dan membuat laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena manajer juga bertindak sebagai pemegang saham yang menginginkan informasi yang benar terkait laba perusahaan (Aorora, 2018). Selaras dengan penelitian Dimara & Hadiprajitno (2017), Roskha et al. (2017), Putra, Kristianti, and Aminah (2018), Nia et al. (2017), Alzoubi (2016c), Purnama (2017), Lestari & Murtanto (2017), Alzoubi (2016b) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Kepemilikan institusional adalah sejumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, investasi, dana

pensiun, bank, reksa dana, lembaga jaminan sosial mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan instusional dapat mengurangi adanya asimetri informasi. Investor institusional memiliki kemampuan menganalisis laporan keuangan lebih teliti dan lebih efisien, mereka juga sensitif terhadap berita laba saat ini (Lemma et al., 2018) sehingga kepemilikan institusional dapat mempengaruhi peningkatan pengawasan kinerja manajemen. Menurut Asward and Lina (2015) investor institusional dianggap mempunyai kemampuan monitoring tindakan manajemen lebih baik daripada investor individual. Investor institusional dalam memonitor perilaku manajerial di pasar berkembang dengan cara seperti bank memberi pinjaman uang yang mana memerlukan audit sebelum menyetujui pinjaman (Bao & Lewellyn, 2017). Penelitian Agustina et al. (2018), Alzoubi (2016b), Roskha et al. (2017), Mongrut and Winkelried (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berhubungan signifikan dan negatif dengan manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan institusional melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat di dalam perusahaan mengakibatkan manajer memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengatur laba dan lebih fokus pada peningkatan kinerja perusahaan.

Kepemilikan asing adalah sejumlah saham yang dimiliki investor asing institusional maupun individu. Kepemilikan saham yang dimiliki investor asing akan meningkatkan pengetahuan akuntansi dan tata kelola perusahaan, karena memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding investor dalam negeri sehingga dapat mengawasi sistem pelaporan keuangan dan kegiatan operasi (Faranita & Darsono, 2017) Sejalan dengan hasil penelitian Nia et al. (2017) dan Alzoubi

(2016c) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berhubungan negatif signifikan terhadap manajemen laba sehingga semakin tinggi tingkat kepemilikan asing, semakin kecil manajer melakukan manajemen laba.

Kepemilikan terkonsentrasi adalah individu/kelompok investor yang memiliki sebagian besar saham perusahaan sehingga jumlah saham yang dimiliki lebih dominan dibanding pemegang saham lainnya. Pemegang saham yang memiliki kepemilikan besar dapat dengan mudah untuk mengakses informasi apapun untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat konflik keagenan antara hubungan manajer dengan pemegang saham maka kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi konflik keagenan karena dengan kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan, mereka mendapatkan posisi yang kuat untuk mengendalikan manajemen untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Sejalan dengan hasil penelitian Lestari & Murtanto (2017) dan Asward & Lina (2015) menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan sehingga komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan. Berdasarkan Keputusan Direktur Bursa Efek Jakarta (Kep-339/BEJ/07-2001), bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris bertanggungjawab terhadap kualitas informasi laporan keuangan agar terhindar dari manajemen laba yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Pasal

97 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Berdasarkan teori agensi, sering terjadi asimetri informasi antara agent dan principal. Dewan komisaris dipilih dan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (Asward & Lina, 2015). Adanya dewan komisaris dari luar perusahaan diharapkan mampu menjalankan tugasnya lebih objektif sehingga dapat menurunkan manajemen laba. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004, yaitu mewajibkan perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari anggota dewan komisaris. Sejalan dengan penelitian Narolita and Krisnadewi (2016), Alzoubi (2016), Alzoubi (2016c), Daghsni et al. (2016), Lestari & Murtanto (2017), Asward & Lina (2015), Abduh & Rusliati (2018), memberi hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Fatmawati (2016) dewan direksi memiliki tanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan. Dewan direksi dipilih dan diangkat oleh pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, dewan direksi mampu menjembatani antara pemegang saham dengan manajemen selaku pengelola perusahaan. Dewan direksi mengadapi tekanan untuk menunjukkan bahwa hak-hak pemegang saham dilindungi dan ditingkatkan, sehingga

menciptakan tekanan internal bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dewan direksi memainkan peran utama dalam *corporate governance*. Terutama, mengawasi kinerja manajerial dan mencapai pengembalian yang memadai bagi pemegang saham, sekaligus mencegah konflik kepentingan (Maher dan Andersson, 1999). Jumlah dewan direksi yang lebih banyak dapat memonitor proses pelaporan keuangan lebih efektif dibandingkan jumlah dewan direksi yang sedikit (Jensen, 1993). Sejalan dengan hasil penelitian Riadiani & Wahyudin (2015) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Berdasarkan peraturan bapenam LK nomor KEP-643/BL/2012 dan OJK nomor 55/POJK.04/2015, setiap perusahaan *go public* wajib memiliki komite audit yang bertindak secara independen. Komite audit bertanggungjawab atas informasi keuangan perusahaan, mengawasi pelaksanaan audit internal, memberikan rekomendasi auditor eksternal. Komite audit dapat mengurangi manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Aorora, 2018). Berdasarkan teori agensi dimana terdapat asimetri informasi di antara manajemen dengan pemegang saham. Komite audit dapat mengurangi asimetri informasi dikarenakan fungsi komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Putra et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Marsha & Ghozali (2017), Alzoubi (2016a), Alzoubi (2016b), Dimara & Hadiprajitno (2017), Sihombing & Laksito (2017) menunjukkan jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Komite audit mengadakan rapat minimal 4 kali dalam satu tahun. Semakin banyak jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat yang dilakukan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Auditor eksternal adalah pihak independen yang berasal dari luar perusahaan bertanggungjawab dalam memberi keyakinan kepada pengguna laporan keuangan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan melalui *auditing*. Auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ISA (*Intenational Standard on Auditing*) dan kode etik audit yang berlaku. Auditor eksternal pada saat mengaudit laporan keuangan perusahaan kliennya dapat menemukan kesalahan yang material dalam sistem akuntansi dan laporan keuangan perusahaan, kemudian menyarankan modifikasi sesuai dengan PSAK yang berlaku kepada pihak manajemen perusahaan. Apabila tidak terdapat tanggapan positif dari pihak manajemen perusahaan, auditor dapat mengungkapkan kesalahan tersebut dalam laporan audit. Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, kehadiran auditor eksternal sebagai mediator hubungan antara pemegang saham dan agen sangat diperlukan. Salah satu pertimbangan penting untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan bagi pemegang saham adalah kualitas audit (Dimara & Hadiprajitno, 2017). Kualitas audit dipandang mampu untuk menaikkan kualitas

laporan keuangan perusahaan. Auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan karena memiliki reputasi, teknologi, pengalaman, modal, sumber daya yang tinggi. Auditor berkualitas tinggi berasal dari KAP *big four* meliputi Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCooper. Sejalan dengan Widyasari et al. (2017), Pasilongi et al. (2018), Alzoubi (2016a), Alzoubi (2016b), Alzoubi (2016c), Mongrut and Winkelried (2018), Alhadab & Clacher (2018), Dimara & Hadiprajitno (2017), Rahdal et al. (2017) bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan Abbadi, Hijazi, and Al-Rahahleh (2016), Indracahya & Faisol (2017), Mujtahidin and Herawaty (2016) menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh negatif signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

### **2.3.2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Manajemen Laba**

*Corporate Social Responsibility disclosure* adalah pengungkapan kegiatan *Corporate Social Responsibility* perusahaan. *Corporate Social Responsibility* atau yang lebih dikenal dengan CSR adalah istilah yang seringkali dipakai berkaitan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Herawati, 2016). Undang-Undang No 40 tahun 2007 memberikan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan

Lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya setiap perusahaan melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral memiliki komitmen atas terjalinnya hubungan perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat setempat yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat tersebut. Pasal pasal 74 ayat 1 dalam undang-undang tersebut mengkhususkan perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta kegiatan usahanya berdampak pada pelestarian lingkungan hidup (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Nomor 12). Apabila terdapat perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan perturan perundang-undangan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.

Menurut Prasetya & Gayatri (2016) teori legitimasi dan teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan aktivitas CSR. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai kontrak dengan masyarakat sekitar untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan memberikan tanggapan terhadap kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk

memberikan legitimasi atas tindakan perusahaan tersebut. Sementara teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan sendiri, tetapi juga harus bermanfaat bagi para stakeholder yang ada di perusahaan.

*Corporate social responsibility disclosure* suatu perusahaan dapat menjadi penghambat dalam melakukan praktik manajemen laba, karena tanggungjawab sosial perusahaan menekankan pada praktik bisnis dijalankan dengan transparan, akuntabel dan dapat diterima secara sosial sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan kualitas informasi yang disajikan dapat meningkat (Kaya & Yazan, 2019). Perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial cenderung bertujuan untuk membina hubungan jangka panjang dengan para stakeholder daripada meningkatkan keuntungan jangka pendek perusahaan (Gras-Gil et al., 2016).

Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan secara tidak langsung akan mendapatkan penilaian positif di mata masyarakat dan investor, yang nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam mengelola laba. Namun penilaian positif ini dapat disalahgunakan oleh pihak manajemen dalam menutupi praktik manajemen laba, karena publik percaya bahwa perusahaan dengan kegiatan CSR yang tinggi tidak mungkin melakukan praktik yang kurang etis seperti manajemen laba, sehingga semakin tinggi CSR sebuah perusahaan maka praktik manajemen laba juga akan semakin tinggi (Wardani & Santi, 2018).

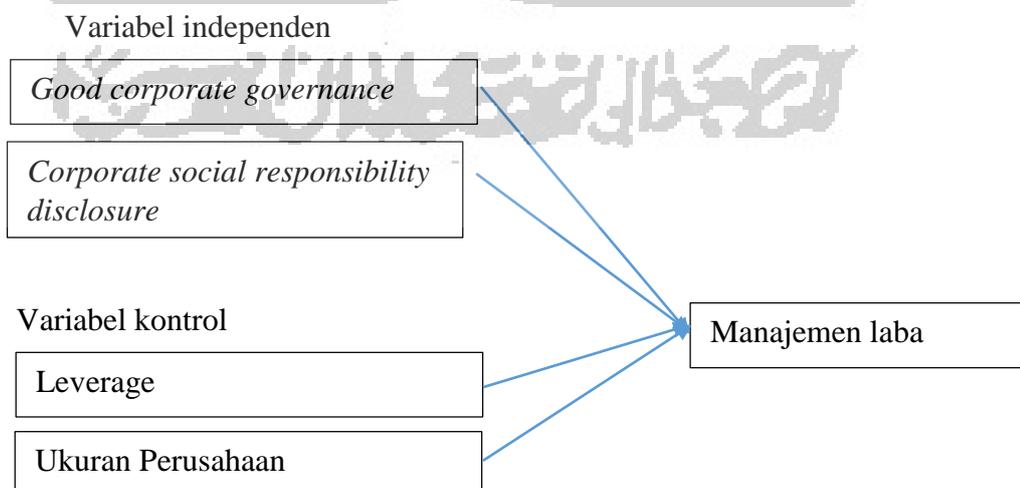
Penelitian yang dilakukan oleh Kaya & Yazan (2019), Gras-Gil et al. (2016), Ardiani & Sudana (2018) memberikan hasil *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan Wardani & Santi (2018) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: *Corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

#### 2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah disebutkan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Untuk pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran teoritis ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

